

**PENERAPAN MODEL SADHARANIKARAN DALAM RETORIKA POLITIK
MODERN DI ERA GLOBALISASI***I Nyoman Alit Suarjaya¹, I Wayan Utama²*^{1,2}IAHN Gde Pudja Mataramalit26januari@gmail.com**Abstract**

Keywords: *In this era of globalization, the development of Asian communications Sadharanikaran Model; Political Rhetoric; Political Discourse; Political Communication* has begun to show an increasingly open dynamic. This article seeks to explore the application of the Asian communication model in modern political rhetoric and its implications for relations development. Asian-based communication requires continuous study. The diverse social and cultural dynamics that are based on the culture of selfishness are not yet fully understood only on the basis of Western communication theory. This article seeks to explain the advantages of a "culture-based" communication model that can develop meaningful relationships in the context of modern political rhetoric by building strong and empathic relationships, enhancing the effectiveness of messages, reducing polarization, and enhancing constructive dialogue.

Abstrak

Kata kunci *Model Sadharanikaran; Retorika Politik; Wacana Politic; Komunikasi Politik* Di era globalisasi ini, perkembangan komunikasi Asia mulai menunjukkan dinamika yang semakin terbuka. Artikel ini berupaya mengeksplorasi penerapan model komunikasi Asia dalam retorika politik modern dan implikasinya terhadap pengembangan hubungan. Komunikasi yang berbasis asia memerlukan kajian yang perlu terus digemakan. Beragam dinamika social budaya yang berbasis pada budaya ketimuran belum sepenuhnya dapat dipahami hanya menggunakan landasan teori komunikasi Barat. Artikel ini berupaya menjelaskan keunggulan komunikasi yang berbasis "budaya ketimuran" model sadharanikaran yang dapat mengembangkan relasi yang bermakna dalam konteks retorika politik modern dengan membangun hubungan yang kuat dan empatik, meningkatkan efektivitas pesan, mengurangi polarisasi, dan meningkatkan dialog konstruktif.

PENDAHULUAN

Komunikasi, dikatakan sebagai urat nadi masyarakat karena merupakan elemen vital bagi berfungsinya tatanan sosial manusia. Komunikasi merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dimana tidak ada budaya yang bisa bernafas tanpa komunikasi. Komunikasi menjadi hal penting untuk menjaga ketertiban sosial, bahkan pada masyarakat

paling primitif yang terkait dengan awal mula umat manusia, komunikasi memainkan peran penting. Seiring dengan berkembangnya masyarakat manusia dan berkembangnya teknologi, media komunikasi menjadi semakin canggih. Selama ini pakar komunikasi masih memusatkan perhatian pada eksplorasi teori-teori komunikasi Barat dan cenderung mengabaikan pemahaman melalui pendekatan komunikasi Asia dengan memperluas bidang komunikasi dan memperluas batas-batas diskursifnya. Hal ini juga akan membantu penelitian komunikasi yang dikontekstualisasikan secara lebih produktif, dengan menggali dan mendeskripsikan kembali pendekatan komunikasi Asia adalah hal yang menarik sekaligus rumit (Dissanayake, 2003). Kita harus bergerak bersama dengan hati-hati dan beroperasi di sejumlah bidang secara bersamaan agar pendekatan yang saintifik terhadap komunikasi berbasis Asia melalui beragam bidang kajian.

Di era globalisasi saat ini, dengan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami transformasi yang signifikan dan bidang komunikasi politik menjadi lebih kompleks dan menantang. Adanya media sosial dan platform digital turut mengubah lanskap komunikasi di ruang dunia maya yang berlangsung dinamis dimana pesan politik menyebar dengan cepat dan luas, mencapai audiens dari berbagai latar belakang budaya. Hal ini menuntut para politisi untuk mengembangkan strategi komunikasi yang tidak hanya efektif tetapi juga inklusif dan resonan dengan keberagaman audiens global yang heterogen.

Kemudahan yang ditawarkan dari perkembangan TIK tidak serta merta membuat persoalan menjadi selesai. Beragam persoalan baru sebagai respons perkembangan tersebut memunculkan masalah seperti kerumitan yang meningkat, kebutuhan strategi inklusif yang resonan terhadap keberagaman, masalah literasi dan transparansi yang pada akhirnya merujuk pada peningkatan *trust*. Kerumitan yang Meningkat terhadap Media sosial telah membuka ruang baru di mana setiap individu dapat menjadi pembuat konten, kritikus, atau pendukung. Ini menciptakan lingkungan yang sangat dinamis dan sering kali tidak terduga, di mana pesan dapat dengan mudah disalah pahami atau disalahgunakan. Politisi harus menavigasi dengan hati-hati setiap pesan, memastikan bahwa pesan mereka jelas dan tidak ambigu, serta dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Kebutuhan akan Strategi yang Inklusif dimana Dengan keberagaman budaya yang semakin meningkat, politisi dituntut juga mengembangkan pesan yang inklusif. Ini artinya, pesan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat beresonansi dengan nilai-nilai dan pengalaman setiap individu yang berbeda. Strategi komunikasi harus mempertimbangkan sensitivitas budaya dan menghindari bahasa yang dapat menyinggung atau memarginalkan kelompok tertentu.

Untuk itu pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya dari audiens yang dituju diperlukan melalui kerja sama dengan ahli budaya dan komunikasi guna memastikan pesan komunikasi sesuai dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang berlaku.

Disamping itu, pemanfaatan teknologi dalam kampanye politik harus lebih dari sekadar alat untuk menyebarkan informasi. Teknologi harus digunakan untuk memfasilitasi dialog yang berarti, mengumpulkan umpan balik, dan memperkuat hubungan antar personal di antara politisi dan konstituen mereka. Ini termasuk penggunaan analitik data untuk memahami kebutuhan dan keinginan publik, serta penggunaan platform interaktif untuk melibatkan warga dalam diskusi substansial. Sifat teknologi yang ditunjang kecepatan jaringan di mana informasi dapat dengan cepat menjangkau audiens dan berujung viral, maka transparansi dan kepercayaan menjadi sangat penting. Politisi harus berkomunikasi dengan jujur dan transparan untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Ini termasuk bersikap terbuka tentang kebijakan, niat, dan tindakan, serta responsif terhadap pertanyaan dan kekhawatiran publik. Dengan demikian, komunikasi politik di era globalisasi membutuhkan pendekatan retorik yang lebih strategis, reflektif, dan adaptif. Politisi dituntut terus-menerus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika sosial agar tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan pesan mereka kepada publik yang beragam.

Riset (Blumenau & Lauderdale, 2024) yang mempertanyakan retorika politik persuasif seperti apa yang diharapkan audiens di Inggris, dengan melakukan desain eksperimental untuk menilai daya persuasif berbagai elemen retorika politik di berbagai isu politik, menemukan perbedaan sederhana dalam efektivitas elemen retorika yang digunakan bersama dan variasi yang signifikan dalam persuasif di berbagai isu. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami faktor-faktor yang membentuk kekuatan argumen dan implikasinya bagi studi komunikasi politik. Hal tersebut didukung (Lægaard, 2019) bahwa fakta dapat memainkan dua peran dalam teori politik yang berkaitan dengan evaluasi dan preskripsi normatif, dimana fakta dapat menjadi bagian dari penerapan prinsip normatif umum dan membenaran prinsip normatif itu sendiri.

Karena diskusi dan debat publik sangat penting dalam mengembangkan demokrasi yang sehat, maka para pemimpin berkewajiban untuk mengedukasi rakyat melalui persuasi yang konstan, sehingga retorika benar-benar menjadi pusat perhatian. Setiap budaya politik yang mendukung dan menumbuhkan etos demokrasi sejati akan dibentuk oleh dinamika ketegangan yang unik dan abadi antara gagasan kepemimpinan dan cita-cita kedaulatan rakyat. Kecurigaan terhadap kepemimpinan pasti membentuk dan memengaruhi gaya dan sifat pidato demokrasi, meningkatkan pentingnya diskusi dan musyawarah publik sambil

memberikan batasan kepada para pemimpin sehubungan dengan apa yang dapat mereka katakan dan bagaimana mereka harus mengatakannya (Ghosh, 2013; Kane & Patapan, 2010). Hal ini menunjukkan betapa perlu dan sulitnya bagi para pemimpin untuk mempertahankan kepercayaan dengan menguasai seni retorika demokrasi yang sederhana.

Demokrasi yang ada hadir dalam berbagai bentuk, masing-masing mewujudkan norma-norma teoritis tertentu dan memiliki sejarah kelembagaan dan budaya tertentu yang dapat secara signifikan memengaruhi praktik retorika lokal. Adanya polarisasi sebagai dampak wacana politik yang dikembangkan insan politik di Indonesia dengan membangun narasi pemisahan antara ‘kita’ dan ‘mereka’ melalui beragam wacana *electoral* membentuk identitas politik. Wacana-wacana tersebut menekankan penggunaan retorika, referensi historis, dan musuh ideologis untuk melegitimasi tindakan politik dan mendefinisikan identitas kolektif (Boukala, 2014). Beragamnya interpretasi argumen politik bagi beragam kalangan audiens turut menjadi perhatian. (Bosworth, 2020) menjelaskan sebuah interpretasi argumen politik dengan membahas bagaimana individu menerima konsistensi argumen politik dan bukan hanya daya tarik retorikanya. Dengan mengusulkan penggunaan metode eliminasi untuk menganalisis argumen politik dalam batasan liberalisme politik dengan membahas masalah retorika dan manipulasi bahasa dalam posisi politik. Sejarah politik baru yang muncul pada tahun 1990-an sebagai respons dan kritik terhadap bahasa politik dan tradisi retorika. Sejarawan politik yang lebih muda, termasuk Jon Lawrence, Miles Taylor, dan James Vernon, berfokus pada pemahaman hubungan antara politik dan rakyat, menunjukkan bahwa partai-partai lebih dari sekadar cerminan pasif perubahan sosial. Penelitian Lawrence menekankan pada budaya politik dan pemilu, hubungan dua arah antara politisi dan pemilih, dalam menghadapi meningkatnya keunggulan bahasa politik dalam sejarah politik (Goldsmith, 2023).

Dikaitkan dengan pernyataan Aristoteles dalam (Zvesper, 1982) yang berpendapat bahwa manusia memiliki logos, akal budi yang bijaksana dan selektif, serta kemampuan berbicara, yang memungkinkan mereka untuk menunjukkan apa yang menguntungkan dan merugikan, serta apa yang adil dan apa yang tidak adil. Dia menerima hal ini sebagai fakta kehidupan dan mencoba untuk melakukan yang terbaik, dengan menunjukkan bahwa klaim karakteristik mereka perlu dikualifikasi dan dimoderasi, tetapi ia tidak ragu untuk mengambil risiko meningkatkan kesadaran ideologis para partisan agar memungkinkan untuk memoderasi keberpihakan mereka secara rasional, sebagian besar dengan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah mengira yang diperlukan sebagai kondisi yang cukup untuk kehidupan politik.

Sebagai upaya berkelanjutan, dengan beragam solusi yang ditawarkan teori komunikasi Barat terhadap dinamika penggunaan retorika dalam politik modern di Asia, yang tentunya memiliki cara pandang berbeda terutama dalam kerangka komunikasi yang berbasis pada budaya ketimuran, sebagaimana dijelaskan (Dissanayake, 2003) tentang pertumbuhan pendekatan Asia terhadap komunikasi, perlunya mengembangkan konsep dan teori Asia melalui eksplorasi tantangan untuk beralih dari model-model Eurosentris, menghindari esensialisme budaya, dan menerapkan kembali konsep-konsep tradisional Asia dalam studi komunikasi. Melalui eksplorasi empiris konsep-konsep Asia dalam konteks budaya tertentu sebagai fokus dalam memahami komunikasi Asia melalui perilaku dan praktik sehari-hari. (Chen & Starosta, 2003) membahas pentingnya mengenali heterogenitas dan homogenitas di Asia ketika mempelajari komunikasi Asia. Ia menyebut pengaruh pemikiran Buddhis terhadap perilaku komunikasi Asia dan pentingnya empati dalam komunikasi, serta menyoroti perlunya menghindari etnosentrisme dan merangkul keragaman budaya. Ia menyarankan untuk menggunakan pola komunikasi Asia, Eropa, atau Afrika sebagai titik awal untuk memahami budaya yang berbeda, dengan menekankan keragaman internal dalam gaya komunikasi Asia ketika diterapkan dalam konteks budaya yang berbeda.

Studi kasus terkait itu pernah dilakukan terhadap wacana politik Aung San Suu Kyi di Burma (Myanmar) yang memadukan Buddhisme dengan demokrasi di Burma. (McCarthy, 2004). Dengan menampilkan agama Buddha sebagai cara integral untuk mengatasi subjektivitas pascakolonial, baik secara budaya maupun politik, penyisipan agama dalam komunikasi politik oleh Suu Kyi menunjukkan interkoneksi heuristik antara studi komunikasi tentang retorika dan wacana pascakolonial. Walaupun berpendidikan Barat, dan merupakan janda dari seorang pria Inggris, ia melawan upaya musuh-musuh politiknya untuk menjebaknya sebagai orang Barat, dan hanya memiliki nama dan etnis Burma. Setelah menguasai meditasi Buddha, afiliasi agamanya memperkuat etosnya (Gorsevski, 2013).

Salah satu model yang diusulkan dalam menjelaskan wacana diatas dalam retorika politik modern adalah *model sadharanikaran*, yang bersumber dari tradisi komunikasi kuno India, memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana komunikasi dapat menjadi alat untuk mencapai pemahaman bersama dan kesatuan. Dalam konteks retorika politik, model ini sangat relevan karena menawarkan kerangka kerja untuk menciptakan pesan yang tidak hanya informatif tetapi juga membangun kesatuan pemahaman antara politisi dan masyarakat. Tujuan utama model *sadharanikaran* adalah pencapaian kesatuan makna

berupa pemahaman bersama—suatu kondisi di mana pengirim dan penerima pesan berbagi makna yang sama dari pesan tersebut. Dalam retorika politik, ini berarti bahwa pesan harus disampaikan dengan cara yang memungkinkan audiens dari berbagai latar belakang untuk menginterpretasikan dan memahami pesan tersebut secara seragam. Artikel ini berupaya mengeksplorasi penerapan model *sadharanikaran* dalam retorika politik modern dan implikasinya terhadap pengembangan hubungan empatik, peningkatan efektivitas pesan, dan pengurangan polarisasi dalam perspektif komunikasi politik.

METODE

Pendekatan penelitian kualitatif ini berorientasi penelitian arsip/dokumen. Fakta yang dikumpulkan dianalisis dan ditafsirkan untuk mendapatkan kesimpulan dan generalisasi. Teknik pengumpulan data, karena penelitian ini adalah dokumen, dimana peneliti mengakses sistem penyimpanan informasi, termasuk perpustakaan untuk pengumpulan bahan penelitian. Berbagai dokumen, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, harus dikumpulkan. Untuk mendapatkan data (fakta) yang relevan, teks sampel pada SMC dan model ritual telah dipelajari dan dibuat catatan. Analisis data dilakukan setelah mengumpulkan data (fakta) yang relevan dari berbagai sumber, analisis dan interpretasi dilakukan secara induktif.

PEMBAHASAN

Membangun Hubungan yang Kuat dan Empatik

Penggunaan prinsip-prinsip *Sadharanikaran*, bagi politisi dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan konstituen mereka. Ini dilakukan dengan menunjukkan empati dan memahami kebutuhan serta aspirasi konstituen. Komunikasi yang empatik dan inklusif membantu membangun kepercayaan dan loyalitas, yang penting dalam politik. Model *sadharanikaran* menekankan pada pentingnya kesatuan (*oneness*), yang bukan hanya tentang kesamaan dalam pemahaman tetapi juga dalam perasaan dan respons. Model ini mengidentifikasi Sembilan elemen (Adhikary, 1970) yaitu: (1) *Sahridayas* (*prashaka*, yaitu pengirim, dan *prapaka*, yaitu penerima), (2) *Bhava* (suasana hati atau emosi), (3) *Abhivyanjana* (ekspresi atau pengkodean), (4) *Sandesha* (Pesan atau informasi), (5) *Sarani* (Saluran), (6) *Rasaswadana* (menerima, mendekode dan menafsirkan pesan dan akhirnya mencapai rasa), (7) *Doshas* (hambatan), (8) *Sandarbha* (konteks), (9) *Pratikriya* (proses umpan balik).

Pelaku komunikasi baik politisi maupun audiens adalah pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Ada dua aspek *sahridaya*, yang umumnya dipahami sebagai pengirim

dan penerima. Kata *sahridaya* telah digunakan dalam dua pengertian. Sebagai 'istilah teknis', merujuk pada orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mengirim dan menerima pesan. Pihak yang terlibat mampu mengidentifikasi satu sama lain sebagai pengirim dan penerima proses tersebut. Istilah tersebut merujuk pada orang-orang yang tidak hanya terlibat dalam komunikasi tetapi juga telah mencapai keadaan khusus "*sahridayata*". Komunikasi dua arah dan saling pengertian antara pihak-pihak yang berkomunikasi yang memiliki hubungan asimetris hanya mungkin terjadi karena konsep *sahridaya* dan *sahridayata*. Setelah selesainya proses pengkodean, bhava terwujud sebagai *sandesha*. *Sandesha* adalah hasil dari proses *abhivyanjana*. Manifestasi bhava ke dalam bentuk (kode) yang dapat dirasakan oleh indera adalah *sandesha* atau pesan atau informasi yang ingin disampaikan pengirim kepada penerima dalam bentuk verbal atau non-verbal tergantung pada pengodean yang dilakukan oleh pengirim. *Sarani* (saluran) pesan tidak dapat sampai ke penerima dari sumber atau pengirim sendiri. Saluran tersebut mungkin alami sesuai dengan sifat biologis manusia seperti: saluran auditori (pendengaran), taktil (sentuhan), visual (penglihatan), olfaktori (penciuman) dan pengecap (pengecap melalui kuncup pengecap di lidah). Saluran-saluran tersebut mungkin artifaktual seperti lukisan, patung, surat, dll. Kedua jenis saluran ini dijelaskan secara luas dalam *Natyashastra*. Saluran-saluran tersebut mungkin mekanis seperti telepon, radio, TV, komputer dan sebagainya. Mengalihkan fokus dari sekadar transfer informasi melalui saluran, Adhikary mempertimbangkan saluran dalam perspektif Hindu tentang komunikasi yang menjelaskan, setidaknya untuk dimensi spiritual dari proses tersebut, tidak akan lengkap kecuali *manas* (pikiran) dan *sharira* (tubuh manusia) dipahami sebagai *sarani*. *Manas* dianggap sebagai indriya (organ sensorik) keenam dalam kepercayaan Hindu adalah *vibhu* (penguasa) dari kelima indra (Adhikary, 1970)

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam retorika politik dapat membantu dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih harmonis dan produktif, di mana pesan tidak hanya disampaikan tetapi juga diterima dan diresonansi dengan cara yang memperkuat ikatan sosial dan politik. Sebagaimana yang dilakukan Aung San Suu Kyi di Burma (McCarthy, 2004) dimana Pesan Suu Kyi menyentuh hati masyarakat dan berlandaskan pada kepercayaan tradisional Buddha. Menggunakan konsep ajaran Buddha, "Sepuluh Tugas Raja" berorientasi pada pemerintahan yang akuntabel, penghormatan pada opini publik, dan supremasi hukum yang berkeadilan. Penekanan gagasan yang berlandaskan ajaran Buddha dalam pidato dan tulisan politiknya, mencerminkan komitmen pribadinya terhadap praktik meditasi. Daya tarik politik Suu Kyi bagi para pemimpin gerakan prodemokrasi disorot, dan perpaduan unik antara Buddhisme dan politik dipandang sebagai cara untuk menyuarakan

oposisi secara efektif. Makalah ini juga mengeksplorasi konteks historis kepemimpinan Buddha di Burma dan pengaruh Buddhisme pada lanskap politik negara tersebut. Suu Kyi memahami pentingnya politik untuk menarik perhatian *endoxa* pada agama Buddha di sebuah negara Buddhis, ia memilih untuk menggunakan gagasan-gagasan Buddhis untuk membangkitkan emosi untuk “perjuangan kedua untuk kemerdekaan nasional” Burma dari para pendengarnya yang sebagian besar beragama Buddha. Mengikuti jejak ayahnya dengan memilih lokasi yang sama untuk menyampaikan pidato politik pertamanya, pagoda Shwedagon, retorika politik Suu Kyi merupakan hasil dari keadaannya yang unik dan keputusannya yang sadar untuk menggabungkan agama Buddha dengan politik dengan cara yang tidak dilakukan oleh ayahnya, dan dari sebagian besar bukti yang ada, kemungkinan besar ia tidak melakukannya. Seperti ayahnya, yang terkadang menuangkan ide-idenya ke dalam bahasa yang dapat diterima dengan lebih baik, Suu Kyi mengindahkan nasihat gurunya dan menyampaikan pesannya melalui media yang dapat dipahami secara lebih personal, namun tetap terdengar manis di telinga para pendengarnya. Ketertarikan pada orang lain itulah yang mendefinisikan seorang ahli retorika Julius Caesar yang sukses dalam kehidupan nyata, dimana ketertarikan pada orang lain diterjemahkan menjadi pemahaman akan jiwa terdalam orang lain dan memanfaatkannya serta keinginannya daripada mencoba mengubah jiwa itu (Rivkin, 2014).

Politisi yang menggunakan prinsip-prinsip *sadharanikaran* akan berupaya menyampaikan pesan yang membangkitkan respons emosional yang serupa di antara audiens yang beragam, sehingga menciptakan rasa kesatuan dan solidaritas. Konsep *sahridayata*, atau kesamaan hati, adalah tentang mencapai orientasi bersama antara pengirim dan penerima. Dalam retorika politik, ini bisa berarti menciptakan narasi yang menekankan pada nilai-nilai dan tujuan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak, terlepas dari perbedaan ideologis atau politik. Melalui model ini, politisi perlu mengembangkan strategi komunikasi yang memperhatikan keberagaman audiens mereka. Ini termasuk memilih kata-kata yang inklusif, menggunakan metafora dan simbol yang memiliki makna lintas budaya, dan menghindari bahasa yang memecah belah atau eksklusif. Untuk mengakomodir upaya tersebut, model ini mendorong dialog dan partisipasi aktif dari penerima pesan. Dalam kampanye politik, ini dapat diwujudkan melalui forum terbuka, diskusi kelompok, dan platform media sosial yang memungkinkan pertukaran ide dan umpan balik dari konstituen. Model *Sadharanikaran* menawarkan kerangka kerja yang kaya untuk politisi yang ingin berkomunikasi dengan cara yang lebih inklusif dan efektif. Penerimaan pernyataan dalam argumen politik tampaknya bertentangan dengan pandangan populer bahwa fakta-fakta

hanya relevan dengan pembenaran normatif berdasarkan 'suatu prinsip yang bukan merupakan respons terhadap suatu fakta (Bosworth, 2020).

Meningkatkan Efektivitas Pesan Politik

Model ini membantu politisi untuk menyampaikan pesan yang lebih efektif dengan memahami nilai-nilai dan kepercayaan audiens. Dengan menyesuaikan pesan agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat secara umum, pesan politik yang relevan dan menarik bagi audiens, memungkinkan pesan diterima dan didukung. Model ini menekankan pada kesederhanaan bahasa yang bersifat universal. Dalam konteks pesan politik, komunikator harus menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua orang. Keterbatasan pemahaman dan perbedaan perspektif individu terutama dalam pengolahan Bahasa pesan dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan istilah teknis yang membingungkan. Penggunaan bentuk pesan yang menarik, seperti cerita pendek, gambar, atau video dapat digunakan melalui kategorisasi audiens. Pesan yang menarik akan lebih efektif dalam menarik perhatian audiens. Saat ini kemudahan beragam media menyediakan sarana dalam menentukan beragam bentuk pesan, namun konsistensi pesan politik perlu dikontrol guna membangun citra yang kuat dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya melalui media social yang berkembang pesat saat ini memungkinkan komunikator politik untuk berinteraksi langsung dengan audiens karena umpan balik diperlukan untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka.

Eksplorasi argumentatif dalam pesan-pesan politik mengartikulasikan imajinasi yang dimiliki bersama secara sosial dan, di sisi lain, dengan membingkai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam ruang-waktu. peluang argumentatif yang ditawarkan dengan mengartikulasikan semesta semiotik dari imajinasi (yang mengelilingi dan menyatukan masyarakat tertentu) dengan pemingkai fakta-fakta atau tema-tema tertentu yang melingkupi kehidupan sosial (Riffo Pavón, 2022). Dewasa ini komunikasi digital mendominasi bagaimana agen berita, iklan, dan wacana politik membentuk dan mengirimkan pesan mereka pada saat yang sama ketika pesan dipahami oleh warga negara, sangat penting untuk membangun visi realitas yang mengelilingi mereka. Dan untuk mengevaluasi pesan dalam aspek informasi, iklan, atau politik, dari semua karakteristik yang dimiliki pesan, dalam konteks komunikasi digital saat ini, ada dua hal yang benar-benar menentukan: kemampuan untuk memanfaatkan persuasi dan kreativitas guna memberikan pengaruh pada audiens, nilai-nilai penting dalam pelaksanaan transmisi dan legitimasi pesan yang diajukan. Keterjangkauan pembaca/pembaca, konsumen, dan pemilih, serta cara kerja

komunikasi digital sebagai sarana tidak hanya memberikan pembacaan yang koheren tentang situasi saat ini, tetapi juga membantu membangun pandangan yang jelas tentang apa yang dapat kita harapkan di masa mendatang, dengan merujuk pada sifat asli setiap pesan (dos Santos & dos Santos, 2022).

Mengurangi Polarisasi Kelompok Masyarakat

Polarisasi kelompok masyarakat akibat dinamika politik yang sangat dinamis menjadi tantangan dimasa yang akan datang. Media sosial berkontribusi pada polarisasi politik dengan menciptakan "ruang gema" yang melindungi orang dari pandangan yang berlawanan tentang peristiwa terkini (Goyal & Goyal, 2023; Peralta et al., 2024). Di era digital, media sosial memainkan peran yang signifikan dalam memperkuat polarisasi politik. Konsep gelembung filter menggambarkan bagaimana algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sudah sesuai dengan pandangan kita. Akibatnya, kita lebih sering terpapar pada informasi dan opini yang mendukung keyakinan yang sudah ada, sementara pandangan yang berbeda jarang muncul di *feed* kita. Gelembung filter ini memperkuat bias kita dan membatasi eksposur kita terhadap sudut pandang yang berlawanan. Penggunaan media sosial yang terkonsentrasi juga berkontribusi pada faktor menakutkan di antara para pemilih, terutama kaum muda. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial dan situs jejaring sosial (Social Networking Sites atau SNS) memungkinkan orang untuk "mengambil terpisah" dalam diskusi politik, sehingga memperkuat polarisasi. Di era globalisasi dan media sosial, informasi dapat menyebar dengan cepat dan mencapai audiens yang lebih luas. Namun, ini juga berarti bahwa pandangan yang berbeda dapat dengan mudah disebarkan dan diperkuat melalui platform digital. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin politik dan kampanye untuk memahami bagaimana menggunakan media sosial secara efektif untuk mengatasi polarisasi dan membangun dialog yang inklusif. Dalam menghadapi tantangan ini, pengguna media sosial harus aktif mencari informasi dari berbagai sumber dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Kampanye politik juga harus memanfaatkan media sosial dengan bijaksana, menghindari retorika yang memperkuat polarisasi dan fokus pada dialog yang memperkaya pemahaman public.

Kajian terkait polarisasi lebih banyak dikaitkan dengan psikologi kritis untuk memahami bagaimana pengetahuan psikologis berkontribusi terhadap hubungan kekuasaan dan polarisasi. Namun, pendekatan arus utama terhadap polarisasi sering kali berfokus pada meminimalkan bias kelompok dan mendorong perubahan sosial yang positif. Pertimbangan intervensi di luar kontak sederhana, karena mereka dapat menggarisbawahi penyebab

psikologis dan persepsi dengan mengorbankan warisan budaya dan sejarah diskriminasi. Pendekatan psikologis-kritis harus mencakup penilaian terhadap niat aksi kolektif dan perubahan kebijakan, serta mengidentifikasi kelompok-kelompok sosial politik di luar partai. Kedepan, Penelitian lain dapat difokuskan pada studi situasi yang menganalisis evaluasi kognitif dan afektif untuk memahami apakah konflik dan perbedaan pilihan dapat meningkat menjadi polarisasi atau apakah konflik tersebut merupakan bagian dari ketegangan kreatif yang mengarah ke masyarakat yang lebih inklusif. Penting untuk membedakan antara konflik politik yang berasal dari dinamika polarisasi dan konflik yang berasal dari perlawanan terhadap reaksi konservatif. Kurangnya pengakuan atas ketidaksetaraan kelompok dan tingginya tingkat orientasi dominasi sosial dan otoritarianisme sayap kanan dapat menghambat pengalaman kontak (Balinhas, 2023).

Dalam konteks retorika politik, model *sadharanikaran* dapat menjadi alat untuk mengurangi ketegangan dan polarisasi. Dengan menekankan pada pemahaman bersama dan kesatuan, politisi dapat mengurangi retorika politis yang memecah belah dan menggantinya dengan pesan yang mempersatukan. Model ini menekankan proses komunikasi yang bersifat relasional dan sosial, bukan hanya sekedar konstruksi individu (Shaw, 2019). Dalam konteks politik, ini berarti memperkuat hubungan antara individu dan kelompok, serta memahami bagaimana pesan politik memengaruhi dinamika sosial yang lebih positif. Pengakuan akan pentingnya emosi dalam komunikasi “kesempatan pada kasih sayang” dianggap sebagai elemen penting dalam komunikasi yang “nyata” (Adhikary, 1970). Dalam retorika politik, ini berarti memperhatikan emosi dan perasaan masyarakat terhadap isu-isu politik yang terkait. Disamping itu, model ini mengakui dalam beberapa konteks sosio-kultural, komunikasi bersifat asimetris (Zhang & Jiang, 2022). Artinya, ada ketidaksetaraan dalam akses informasi dan kekuasaan komunikasi. Universalisasi sosial juga menjadi bagian dari model ini, yang menekankan pentingnya memastikan pesan politik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat yang penerapannya mempertimbangkan konteks budaya dan sosial yang spesifik.

Meningkatkan Dialog Konstruktif:

Retorika politik memainkan peran penting dalam meningkatkan dialog konstruktif antara politikus dan audiensnya. Melalui pencitraan pribadi dan organisasi, politikus dapat memanfaatkan retorika untuk menghidupkan pencitraan pribadi dan organisasi partai. (Isa & Zayyad, 2023; Rank, 1980) menunjukkan retorika berfungsi sebagai alat yang mencerminkan dan berkontribusi pada struktur social yang memungkinkan individu untuk

menegakkan diferensiasi politik dan menolak mengubah perspektif mereka. Strategi retorika tidak hanya menjadi fokus penting analisis politik, tetapi juga dapat diintegrasikan ke dalam kerangka analitis untuk mengonseptualisasikan fungsi kekuatan politik dalam masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh politisi mengikuti pola yang konsisten: mereka sering menggunakan strategi retorika dan sangat bergantung pada bahasa persuasif. Gaya komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif dan meninggalkan kesan abadi pada pemilih atau audiens. Selain itu, politisi secara strategis memanfaatkan retorika untuk membangkitkan emosi dan terhubung dengan pengikut mereka, dengan demikian mempertahankan dukungan mereka dan mempertahankan basis pengikut yang kuat. Retorika berfungsi sebagai alat untuk kontestasi politik, yang melibatkan wacana rasional yang juga mencakup nilai-nilai yang saling bersaing dan sering kali disertai dengan emosi yang kuat.

Melalui retorika politik, politikus dapat mengartikulasikan visi misi dan program mereka yang ditawarkan, serta membentuk opini publik. Pemaparan rencana masa depan dan berbagai kebijakan yang akan diambil melalui kata-kata yang efektif, dapat dilkakukan untuk meyakinkan audiens tentang kebijakan dan rencana yang akan dilakukan. Upaya meminimalisir perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan dapat dilakukan dengan membangun kesepahaman dengan audiens melalui bahasa persuasif dan memperkuat komitmen. Komunikasi persuasif, yang didefinisikan sebagai pesan apa pun yang dirancang untuk memengaruhi sikap atau perilaku orang, adalah konsep inti dalam psikologi sosial. Ada kemungkinan bahwa kesarjanaan komunikasi persuasif tidak akan ada jika bukan karena karya klasik Carl I. Hovland, Irving L. Janis, dan Harold H. Kelley yang berjudul *Communication and Persuasion*, dan proposisi teoretisnya masih terus dikaji hingga saat ini. Pendekatan yang diuraikan menjadi dasar bagi berbagai teori dan program penelitian, menyarankan model tripartit, di mana sumber, pesan, dan audiens menentukan dampak persuasive (Rosenberg et al., 2022). Tentu argument tersebut harus didukung data dan hasil riset yang memadai terkait harapan masa depan.

Model Sadharanikaran mendorong dialog yang konstruktif, di mana semua pihak didorong untuk berpartisipasi dalam diskusi yang bermakna. Dalam konteks politik dan sosial, pendekatan ini memiliki beberapa implikasi positif dengan menekankan pentingnya pemahaman bersama. Dalam dialog yang konstruktif, peserta berusaha memahami sudut pandang dan kekhawatiran orang lain. Ini membantu mengurangi ketidaksetujuan dan memperkuat kesadaran tentang kompleksitas isu-isu politik. Hal tersebut dapat berimplikasi pada upaya penghindaran konflik. Dengan fokus pada dialog yang konstruktif, model ini

mengurangi risiko konflik dan retorika politik yang merusak. Alih-alih saling menyerang, peserta berusaha mencari titik kesamaan dan solusi bersama, menemukan konsensus yang konstruktif dan memungkinkan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, kita dapat mengidentifikasi solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Komunikasi yang berbasis Asia memerlukan kajian yang perlu terus digemakan. Beragam dinamika sosial budaya yang berbasis pada budaya ketimuran belum sepenuhnya dapat dipahami hanya menggunakan landasan teori komunikasi Barat. Artikel ini berupaya menjelaskan keunggulan komunikasi yang berbasis “budaya ketimuran” terutama model *sadharanikaran* yang dapat mengembangkan relasi yang bermakna dalam konteks retorika politik modern dengan membangun hubungan yang kuat dan empatik, meningkatkan efektivitas pesan, mengurangi polarisasi, dan meningkatkan dialog konstruktif. Selanjutnya, diperlukan kajian dan riset lapangan yang berkelanjutan berkaitan dengan penerapan model *sadharanikaran* sebagai salah satu model komunikasi Asia dalam konteks komunikasi politik yang berkembang dinamis dari berbagai aspek dan elemen komunikasi dalam upaya membangun sistem demokrasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikary, N. M. (1970a). An introduction to *sadharanikaran* model of communication. *Bodhi: An Interdisciplinary Journal*, 3(1), 69–91.
<https://doi.org/10.3126/bodhi.v3i1.2814>
- Adhikary, N. M. (1970b). The *Sadharanikaran* Model and Aristotle’s Model of Communication: A Comparative Study. *Bodhi: An Interdisciplinary Journal*, 2(1).
<https://doi.org/10.3126/bodhi.v2i1.2877>
- Balinhas, D. (2023). Bringing critical social psychology to the study of political polarization. *Social and Personality Psychology Compass*, 17(1).
<https://doi.org/10.1111/spc3.12721>
- Blumenau, J., & Lauderdale, B. E. (2024). The Variable Persuasiveness of Political Rhetoric. *American Journal of Political Science*, 68(1), 255–270.
<https://doi.org/10.1111/ajps.12703>
- Bosworth, W. (2020). An interpretation of political argument. *European Journal of Political Theory*, 19(3). <https://doi.org/10.1177/1474885116659842>
- Boukala, S. (2014). Waiting for democracy: Political crisis and the discursive (re)invention of the “national enemy” in times of “Grecovery.” *Discourse and Society*, 25(4).
<https://doi.org/10.1177/0957926514536961>
- Chen, G.-M., & Starosta, W. J. (2003). Asian Approaches to Human Communication: A Dialogue. *Intercultural Communication Studies*, XII(4).
- Dissanayake, W. (2003). Asian Approaches to Human Communication: Retrospect and Prospect. *Intercultural Communication Studies*, XII(4).
- dos Santos, A. F., & dos Santos, M. L. (2022). *Journalistic, Advertising and Political*

- Message in the Digital Age* (pp. 341–351). https://doi.org/10.1007/978-3-030-85799-8_29
- Ghosh, C. (2013). Rhetoric and Democratic Inclusion. In *The Politics of the American Dream*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137289056.0008>
- Goldsmith, R. (2023). Towards the Vernacular, Away from Politics? Political History after the ‘New Political History.’ In *Political Quarterly* (Vol. 94, Issue 2). <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13262>
- Gorsevski, E. W. (2013). Posting Notes on Buddhism: Aung San Suu Kyi’s Rhetoric of Postcolonial Subjectivity. *Journal of Communication and Religion*, 36(1).
- Goyal, S., & Goyal, M. (2023). Impact of Social/Traditional Media on Political Polarization. *Journal of Student Research*, 12(2). <https://doi.org/10.47611/jsrhs.v12i2.4296>
- Isa, S. M., & Zayyad, K. M. (2023). Rhetoric and Political Power: Analyzing Language and Persuasion in Political Discourse. *Tasambo Journal of Language, Literature, and Culture*, 2(02), 31–38. <https://doi.org/10.36349/tjllc.2023.v02i02.004>
- Kane, J., & Patapan, H. (2010). The artless art: Leadership and the limits of democratic rhetoric. *Australian Journal of Political Science*, 45(3). <https://doi.org/10.1080/10361146.2010.499162>
- Lægaard, S. (2019). The role of interpretation of existing practice in normative political argument. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 22(1). <https://doi.org/10.1080/13698230.2017.1403128>
- McCarthy, S. (2004). The Buddhist political rhetoric of Aung San Suu Kyi. *Contemporary Buddhism*, 5(2). <https://doi.org/10.1080/1463994042000291556>
- Peralta, A. F., Ramaciotti, P., Kertész, J., & Iñiguez, G. (2024). Multidimensional political polarization in online social networks. *Physical Review Research*, 6(1), 013170. <https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.013170>
- Rank, H. (1980). Analyzing Political Rhetoric. *The English Journal*, 69(9), 38. <https://doi.org/10.2307/816378>
- Riffo Pavón, I. (2022). La construcción del mensaje político a partir de los imaginarios sociales y el framing. *Atenea (Concepción)*, 28(525), 45–63. <https://doi.org/10.29393/At525-3CMIR10003>
- Rivkin, N. (2014). Julius Caesar and the art of rhetoric. *Future Human Image*, (4), 102–109. *Future Human Image*, 1(4).
- Rosenberg, B. D., Marshburn, A., & Siegel, J. T. (2022). Persuasive Communication: Source, Message, Audience. In *Oxford Research Encyclopedia of Psychology*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.285>
- Shaw, P. (2019). Sadharanikaran Model vs Mathematical Model: Analyzing their Relevance in Context of Social Media. *Bodhi: An Interdisciplinary Journal*, 7. <https://doi.org/10.3126/bodhi.v7i0.27906>
- Zhang, C., & Jiang, R. (2022). Asymmetrical Perceptions" in The Context of Political and Cultural Differences Between East and West. *International Journal of Education and Humanities*, 4(2), 20–24. <https://doi.org/10.54097/ijeh.v4i2.1476>
- Zvesper, J. (1982). The Problem of Liberal Rhetoric. *The Review of Politics*, 44(4). <https://doi.org/10.1017/S0034670500041486>